

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERKAIT
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG)**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH:

VINSA JUANDA SARI
NIM: 2020123060

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg)

(Vinsa Juanda Sari, 2020123060, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 134 halaman, 2024)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya pada Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam konteks pengadaan tanah yang melibatkan dana publik dan potensi tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait kasus yang diteliti. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah fakta hukum yang ada dan penerapan teori hukum terkait pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Notaris/PPAT dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg, Notaris/PPAT didakwa karena dianggap turut serta dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Namun, pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada bukti adanya kesalahan (schuld) dan hubungan kausalitas antara tindakan Notaris/PPAT dan kerugian yang ditimbulkan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT khususnya pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan setiap tindakan mereka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari potensi masalah hukum, Notaris/PPAT harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar. Kasus ini juga menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas mereka.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Notaris/PPAT, peralihan hak atas tanah, kepentingan umum, Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg

Criminal Liability of Notary/PPAT Related to Land Acquisition for Public Interest (Case Study of Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg)

(Vinsa Juanda Sari, 2020123060, Master of Notary Program, Faculty of Law, Andalas University, 134 pages, 2024)

ABSTRACT

This research focuses on the criminal liability of Notary/PPAT in land acquisition cases for the public interest, specifically in Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg. The background of this research is the importance of understanding the limits of Notary/PPAT criminal liability in carrying out their duties, especially in the context of land acquisition involving public funds and the potential for corruption. The problem formulations in this research are: 1) How is the liability of Notary/PPAT in the implementation of land rights transfer for public interest based on Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? 2) How are the judges' considerations related to the criminal liability of Notary/PPAT in land acquisition for the public interest based on Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? This research uses normative legal research methods with a case approach. The data used is secondary data, including laws and regulations, legal literature, and documents related to the case under study. The analysis is carried out descriptively analytically by examining the existing legal facts and the application of legal theories related to liability. The results showed that in the case of land acquisition for public interest, Notary/PPAT can be held criminally liable if proven to have violated the law. In Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg, Notary/PPAT was charged for participating in a corruption crime related to land acquisition for public facility development. However, this liability must be based on evidence of schuld and a causal link between the Notary/PPAT's actions and the loss caused. This study provides an in-depth understanding of the limits of Notary/PPAT criminal liability, particularly administrative, civil and criminal liability. The study concludes that Notaries/PPATs have complex legal responsibilities in land acquisition for public interest, and their every action must be in accordance with the prevailing laws and regulations. To avoid potential legal problems, Notaries/PPATs must always be careful and ensure that all procedures are properly executed. This case also shows the need for further study on legal protection for Notary/PPAT in performing their duties.

Keywords: Criminal liability, Notary/PPAT, transfer of land rights, public interest, Decision Number 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg

